

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN  
BULELENG  
TAHUN 2016**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
PERSANDIAN  
KABUPATEN BULELENG  
2017**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, kami menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan selama tahun 2016. Melalui laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran dan telaahan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan ke dalam perencanaan strategik sebelumnya.

Walaupun di dalam penyusunannya diusahakan secara optimal, namun laporan ini tetap saja mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dari pihak terkait sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Singaraja, 31 Januari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Persandian Kabupaten Buleleng.



**Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620608 198203 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Data Umum Organisasi .....	1
D. Isu Strategis Organisasi .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	4
A. Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng .....	4
B. Penetapan Kinerja .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
B. Realisasi Anggaran .....	21
BAB IV PENUTUP .....	23
LAMPIRAN	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Setingkat Eselon II, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan otonomi daerah di bidang Informasi dan Komunikasi.
2. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok tersebut diatas, ditetapkan dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu Terwujudnya pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) dengan baik, dan Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
3. Dari ketiga tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak diwujudkan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (elektronik-Government/e-Gov), Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Tersebarluaskannya informasi pembangunan kepada masyarakat, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyebarkan dan memanfaatkan informasi.
4. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka terdapat sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2016.
5. Dari hasil pengukuran IKU yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, terdapat satu indikator yang pencapaiannya melebihi 100%, dua indikator tercapai 100%, dan satu indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Sedangkan pada sisi keuangan, secara keseluruhan tercapai 99,13%.
6. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terdapat permasalahan yang prinsipil yang dapat menghambat atau mengganggu keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pada umumnya program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Walaupun tidak terdapat hal-hal yang namun terbitnya regulasi (Undang-undang) terbaru perlu menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan tidak menjadi masalah. Demikian pula dalam pemberian pelayanan informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan relevan dengan mempergunakan layanan Web Site <http://www.bulelengkab.go.id>; E-Mail: [kominfo@bulelengkab.go.id](mailto:kominfo@bulelengkab.go.id) dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara bertahap meningkatkan profesionalisme aparatur yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

### **C. Data Umum Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 ditetapkan tanggal 18 Februari 2008 dan diundangkan 14 Maret 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng. Dinas ini merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 55 tahun 2008 tanggal 8 September 2008 disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, sedangkan fungsinya antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Peningkatan pemanfaatan peranan komunikasi melalui media massa modern dan tradisional.
4. Pengupayaan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika.
5. Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas jaringan informasi.
6. Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informatika antara kabupaten/kota, Provinsi dan pusat dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
7. Pemantauan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum.
8. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengawasan dalam rangka penertiban peredaran film dan rekaman video komersial.
9. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara elektronik.
10. Pemberian rekomendasi terhadap pemohon perijinan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas.
12. Pengelolaan Tata Usaha Dinas

#### **D. Isu Strategis Organisasi**

Isu-isu strategis yang saat ini dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng adalah:

1. Belum diterapkannya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government) dengan baik, sesuai dengan Master Plan Pembangunan e-Government yang telah ada, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good Governance*).
2. Kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang *nyegare gunung*, sehingga tidak meratanya kemampuan aksesibilitas desa-desa untuk mengakses internet.
3. Belum lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga informasi pembangunan daerah belum menyebar secara menyeluruh kepada masyarakat.
4. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng**

##### 1. Visi dan Misi

Visi Dinas komunikasi dan informatika kabupaten buleleng adalah **“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien”**. Visi ini memiliki makna keinginan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya Komunikasi dan Informatika, bahkan mampu menjadikan informasi itu sebagai kebutuhan pokok, seperti halnya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang harus dilakukan adalah:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah yang efektif dan efisien.

##### 2. Tujuan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Government) dengan baik.
- b. Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

##### 3. Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (electronic Government/e-Gov).
- b. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Meningkatnya penyebaran informasi daerah kepada masyarakat.

Rincian perencanaan sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Jangka Menengah**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					Kondisi Akhir
					2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) dengan baik	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (electronic Government/e-Gov)	Persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov	%	100	100	100	100	100	100
			Nilai rata-rata Penilaian PEGI Pemkab. Buleleng	-	0	2	2,2	2,5	2,6	2,6
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase jumlah SDM Aparatur yang terlatih di bidang TIK	%	3	7,23	11,02	12,16	16,95	16,95
2	Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya penyebaran informasi daerah kepada masyarakat	Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik	%	100	100	100	100	100	100

#### 4. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- a. Membangun dan memelihara jaringan online Pemkab Buleleng
- b. Menyediakan akses internet untuk seluruh titik tersambung dalam jaringan online
- c. Membangun aplikasi-aplikasi online yang mendukung pelayanan pemerintah
- d. Mengoptimalkan pengelolaan subdomain SKPD yang ada pada situ resmi Pemkab Buleleng
- e. Memberikan pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa Pemkab Buleleng melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
- f. Mengumpulkan dan mengelola data pembangunan dari seluruh SKPD dan potensi daerah dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa
- g. Membina dan mengawasi pemanfaatan piranti lunak legal pada instansi pemerintah
- h. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- i. Penyelenggaraan pelatihan/ bimtek bagi aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- j. Mengikutkan aparatur pemerintah pada pelatihan/bimtek di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- k. Menyebarluaskan informasi melalui media komunikasi yang ada
- l. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok informasi masyarakat di desa-desa serta membinanya secara berkala.

#### 5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai misi tersebut adalah:

- a. Menghubungkan seluruh SKPD hingga ke desa dalam jaringan online Pemkab Buleleng
- b. Menyalurkan akses internet melalui jaringan online
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam membangun dan mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Pemkab Buleleng
- d. Memberikan pembinaan kepada pengelola subdomain SKPD agar memberikan informasi dan tampilan subdomain yang optimal.

- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan server dan perangkat pendukung LPSE lainnya guna meningkatkan pelayanan LPSE baik kepada instansi pemerintah maupun pihak swasta yang membutuhkan
- f. Melakukan penggalan data pelaksanaan pembangunan pemerintah langsung ke SKPD terkait dan menggali potensi daerah hingga ke desa-desa.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung ke instansi pemerintah agar menggunakan piranti lunak yang legal.
- h. Membuat, memelihara dan mengelola lab pelatihan komputer untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- i. Memberikan pelatihan/bimtek bagi aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan teknologi, dan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang TIK
- j. Mengikutkan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika pada pelatihan/bimtek sesuai dengan kebutuhan, perkembangan teknologi, dan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang TIK
- k. Menyebarluaskan informasi tentang pembangunan daerah dengan menggunakan media cetak, tradisional, moderen, dan elektronik
- l. Menyebarluaskan informasi melalui Pameran Pembangunan
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah
- n. Melakukan komunikasi aktif (dialog) baik secara interaktif maupun secara langsung dengan masyarakat
- o. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kelompok informasi masyarakat
- p. Membantu masyarakat untuk dapat membentuk kelompok informasi di tempatnya serta melakukan pembinaan secara berkala.
- q. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dengan mengangkat potensi daerah/ kelompoknya

#### 6. Program Pencapaian Sasaran

Program yang dilakukan untuk mencapai misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- d. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

## **B. Penetapan Kinerja**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (electronic Government/ e-Gov)	1. Persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-gov	100%	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.157.800.000
		2. Nilai rata-rata Penilaian PEGI Pemkab. Buleleng	2,5	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	337.080.000
				2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	137.305.000
2.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi	1. Persentase jumlah SDM Aparatur yang terlatih di bidang TIK	12,16%	1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	106.000.000
3.	Meningkatnya penyebaran informasi daerah kepada masyarakat	1. Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik	100%	1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	682.605.000

**Jumlah Anggaran:**

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : Rp. 1.494.880.000,00
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika : Rp. 137.305.000,00
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi : Rp. 106.000.000,00
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa : Rp. 682.605.000,00

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng tahun 2016, berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (electronic Government/ e-Gov).

Dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) maka penerapan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau yang lebih dikenal dengan *e-government (e-Gov)* menjadi sangat penting. Perkembangan TIK saat ini sangat berpengaruh pada penerapan e-gov di Kabupaten Buleleng.

Keberhasilan penerapan e-gov tidak hanya bergantung pada pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data saja namun bagaimana perangkat tersebut benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-gov	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00
2.	Nilai rata-rata Penilaian PEGI Pemkab. Buleleng	2,2	2,5	3,58	143,20	2,6	138,69

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

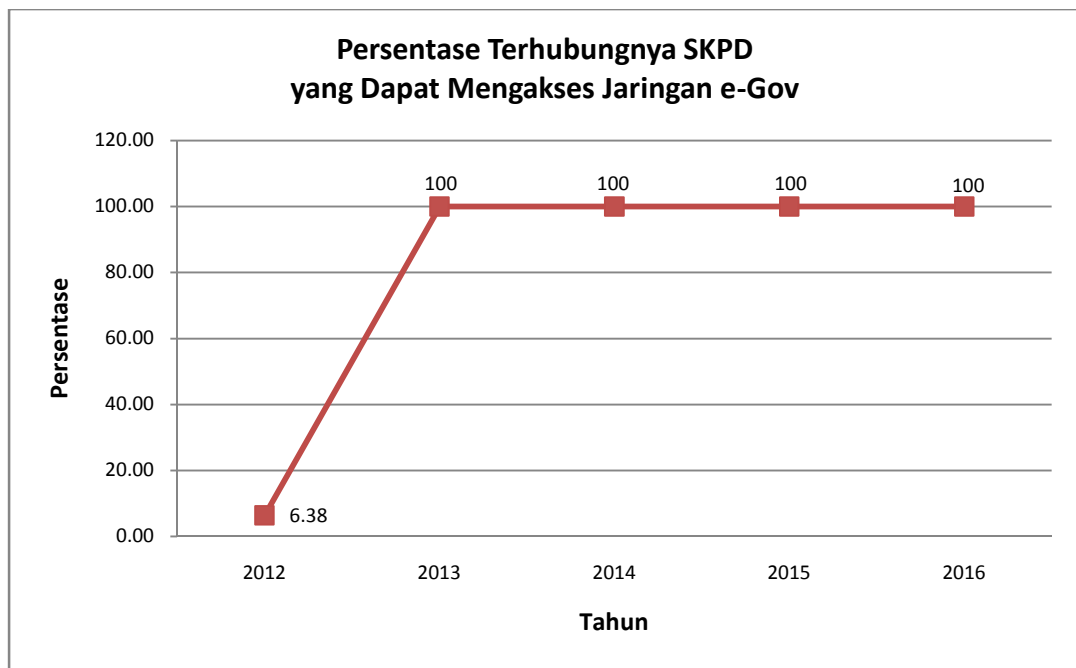
*a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016*

Persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-gov yang ditargetkan sebesar 100,00% dapat direalisasikan sebesar 100,00% atau tercapai 100,00%. Hal ini disebabkan karena koneksi jaringan SKPD yang telah ada dapat dipelihara dan dijaga kehandalannya sehingga dapat mengakses jaringan e-gov dengan baik.

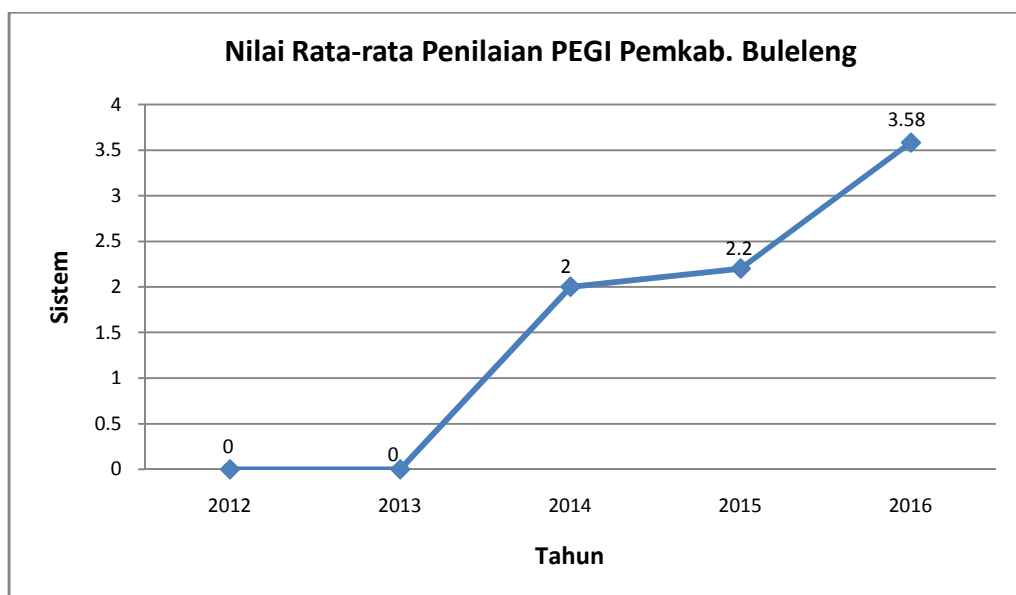
Sedangkan pada indikator nilai rata-rata penilaian PEGI Pemkab. Buleleng, dari target nilai 2,5 yang dapat diperoleh nilai 3,58 atau tercapai 138,69%.

*b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 1, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Persentase Terhubungnya SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov dari tahun ke tahun



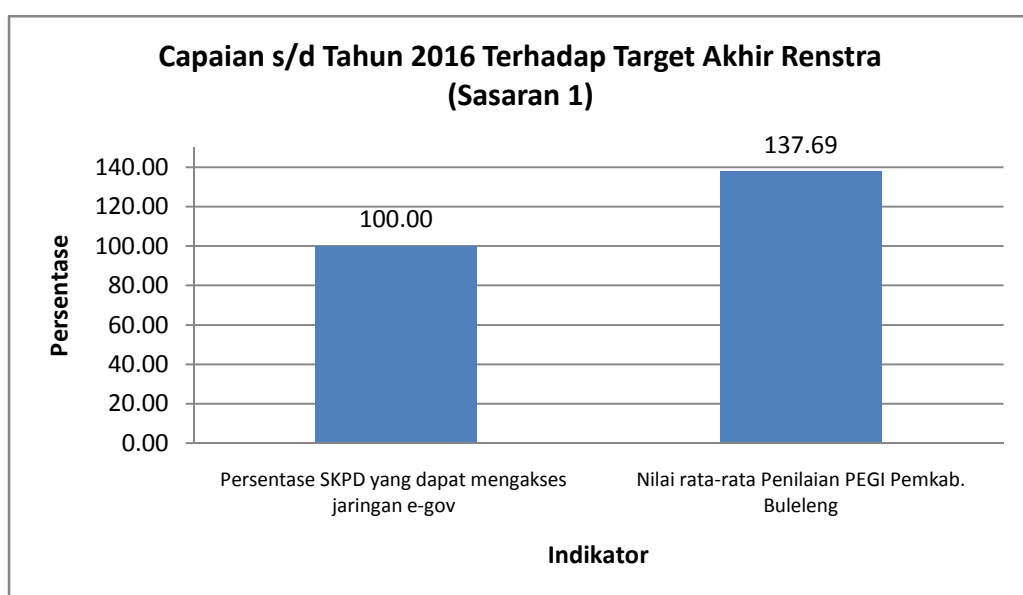
Gambar 2. Grafik nilai rata-rata penilaian PEGI Pemkab. Buleleng dari tahun ke tahun



Dari gambar grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada indikator pertama dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dilakukan pemeliharaan dan menjaga kehandalan jaringan yang telah terbangun agar seluruh SKPD dapat terhubung dengan baik dalam jaringan e-gov dan dapat mengakses data dengan baik. Sedangkan pada indikator kedua terjadi peningkatan hasil dari penilaian PEGI dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Bahkan pada tahun 2016 pencapaiannya melebihi target tahun 2016.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra

Bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2016 dengan target akhir renstra, maka pada indikator: persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-gov, yang mana telah tercapai 100,00% dari target 100,00% atau mencapai 100,00%, atau telah tercapai, namun bagaimana kondisi tersebut dapat dipertahankan dan dipelihara agar kondisi jaringan dapat handal. Sedangkan pada indikator: Nilai rata-rata penilaian PEGI Pemkab Buleleng, dari target 2,6 di akhir Renstra, telah tercapai 3,58 atau melebihi target yang mencapai 137,69%. Hal ini perlu ditingkatkan atau minimal dipertahankan agar pencapaian nilai rata-rata tersebut tidak menurun.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2016 telah sesuai dengan target capaian, bahkan lebih. Hal ini selain disebabkan karena komitmen pimpinan daerah untuk mewujudkannya, serta mendorong pembangunan e-government di Kabupaten Buleleng.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Buleleng dan cuaca yang dapat mengganggu kehandalan koneksi jaringan pada SKPD. Untuk itu dibutuhkan monitoring dan perawatan jaringan online yang ada, sehingga tetap handal dan SKPD dapat mengases data dengan baik.
- 2) Belum terkoodinasinya dengan baik pembangunan e-government di Pemkab Buleleng, sehingga dibutuhkan komitmen bersama dalam pembangunan e-government agar dapat terkoordinasi dengan baik dan saling mendukung. Dengan demikian, penilaian PEGI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi kinerja pada Sasaran 1, dari kedua indikator tersebut berhasil dicapai sebesar 121,60% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 99,17%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Realisasi keuangan yang kurang dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak, dan foto copy.

*f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk dapat mencapai Sasaran 1 ini, maka terdapat 2 Program dan 7 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah:

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
  - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
  - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
  - Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak

- Fasilitasi penyebarluasan informasi
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data
2. Sasaran 3: Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Guna mendukung terlaksananya pemerintahan yang berbasis elektronik (e-Gov) maka kapasitas aparatur pemerintah di bidang TIK harus terus ditingkatkan. Karena seberapa baik dan tingginya teknologi yang digunakan akan tidak optimal jika tidak ditunjang dengan sumber daya manusia/aparatur yang memadai, maka akan tidak optimal pemanfaatannya. Sehingga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini menjadi bagian yang sangat penting.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase jumlah SDM Aparatur yang terlatih di bidang TIK	11,04	12,16	11,55	94,98	16,95	68,14

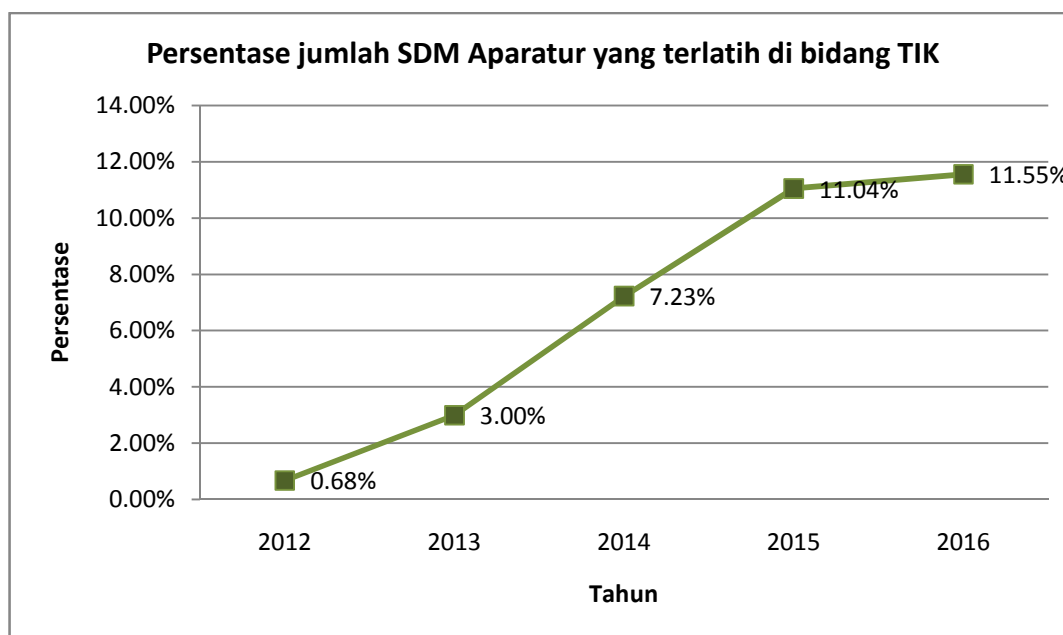
Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

*a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016*

Persentase jumlah SDM aparatur yang terlatih di bidang TIK yang ditargetkan sebesar 12,16% dapat direalisasikan sebesar 11,55% atau tercapai 94,98%. Ketercapaian ini kurang dari target karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan pengurangan anggaran untuk pelatihan, sehingga jumlah SDM aparatur yang mengikuti pelatihan di bidang TIK berkurang.

b. *Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 2, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

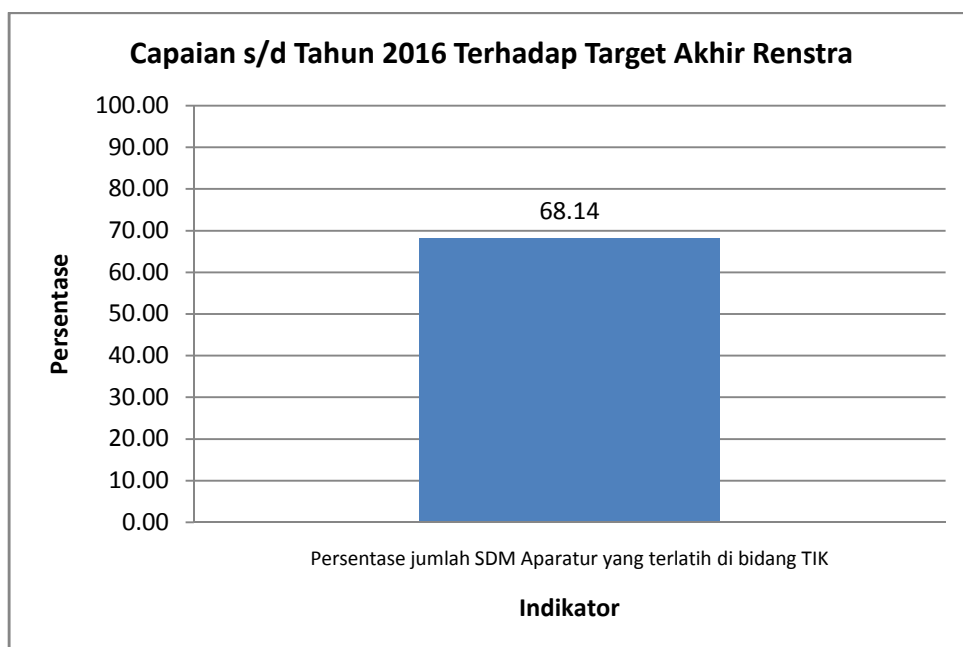


Gambar 4. Grafik Persentase jumlah SDM Aparatur yang terlatih di bidang TIK dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas terlihat perbedaan angka capaian pada capaian tahun 2016 dan tahun sebelumnya dengan tabel realisasi di atas, hal ini disebabkan karena data yang digambarkan dari grafik tersebut merupakan akumulasi (capaian sampai dengan) dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sedangkan pada tabel merupakan capaian realisasi tahun bersangkutan. Sehingga terlihat meningkat dari tahun ke tahun.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 5. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Akhir Renstra

Bila dibandingkan realisasi capaian sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir renstra, maka telah tercapai 11,55% dari target 16,95% atau mencapai 68,14%, masih kurang 31,86% yang akan diselesaikan pada tahun 2017, sehingga optimis target tersebut akan tercapai.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2016 belum mencapai target. Hal ini selain disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan jumlah SDM aparatur yang ditargetkan untuk dapat mengikuti pelatihan bidang TIK berkurang.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dibidang TIK, sehingga banyak permintaan untuk pelatihan baik itu dari aparatur desa maupun dari SKPD yang belum dapat diakomodir. Sehingga akan terus diusahakan untuk memperoleh dana tambahan yang dapat
- 2) Masih kurangnya fasilitas lab pelatihan komputer yang dimiliki sehingga jumlah yang dilatih masih sangat terbatas. Selain itu juga ruangan lab yang belum representatif dan kurang nyaman, sehingga kurang menunjang pelatihan yang dilakukan. Sehingga yang dapat dilakukan adalah membuat usulan peningkatan fasilitas lab kepada

pimpinan daerah dan Kementerian Kominfo di Pusat, dan memaksimalkan perangkat yang dimiliki.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi kinerja pada Sasaran 2, dari indikator tersebut berhasil dicapai sebesar 94,98% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 99,79%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi keuangan dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.

*f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk dapat mencapai Sasaran 2 ini, maka terdapat 1 Program dan 3 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- Bimbingan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi
- Pengelolaan Fasilitas Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

3. Sasaran 3: Meningkatkan penyebaran informasi daerah kepada masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, maka semua lembaga publik wajib untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi-informasi yang diperkecualikan. Untuk itu, SKPD sebagai lembaga publik wajib memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Jika tidak maka masyarakat dapat melakukan gugatan informasi.

Selain itu juga keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jika tidak terpublikasikan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat maka akan menjadi kurang berkesan bagi masyarakat dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Capaian kinerja sasaran ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00

Dari data pada tabel tersebut, dapat disampaikan analisis capaian sebagai berikut:

*a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016*

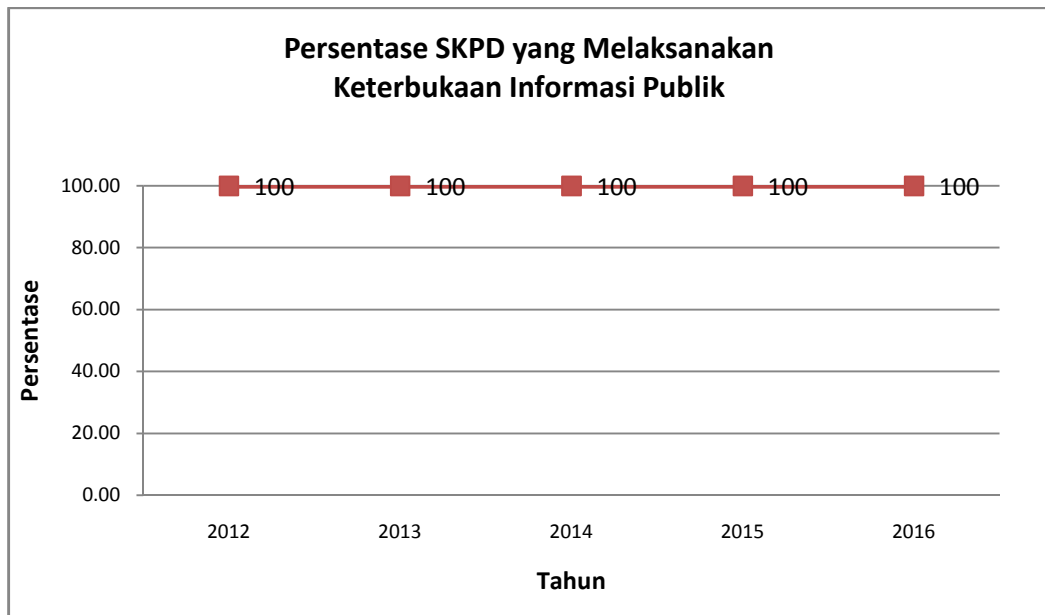
Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik didasarkan pada keaktifan SKPD dalam mempublikasikan informasi baik melalui situs resmi Pemkab Buleleng/ sub domain masing-masing SKPD, melalui media-media komunikasi yang disediakan Dinas Kominfo. Selain itu juga, ada tidaknya perselisihan informasi antara masyarakat dengan SKPD menjadi salah satu tolak ukur pengukuran indikator ini.

Dari target 100,00% persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik pada tahun ini, dapat direalisasikan sebesar 100% atau tercapai 100% dari target. Ketercapaian ini merupakan wujud dari tingginya kesadaran SKPD sebagai lembaga publik untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

*b. Perbandingan antara capaian realisasi tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Perbandingan capaian antara tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Sasaran 3, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



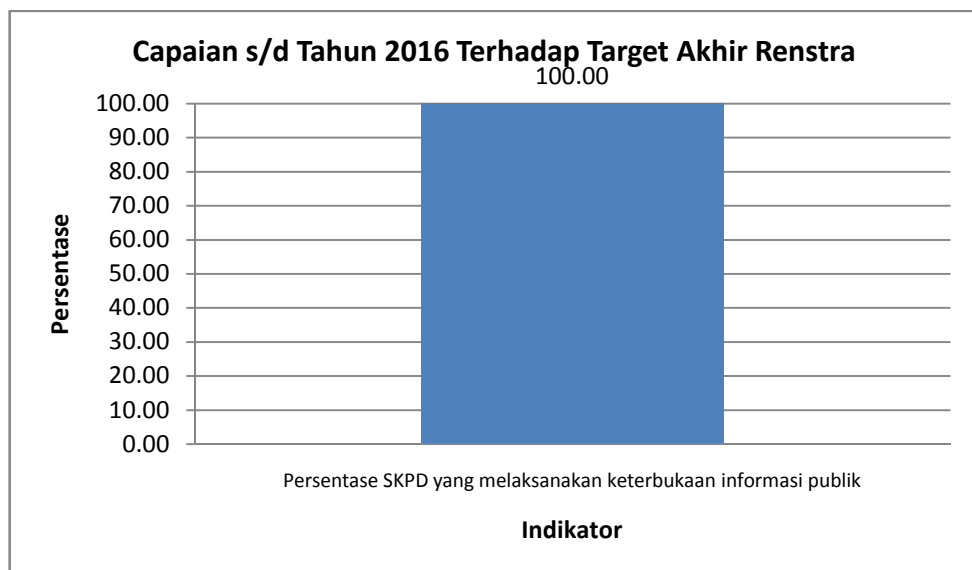


Gambar 6. Grafik Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun

Dari gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, SKPD di lingkup Pemkab Buleleng telah melaksanakan keterbukaan informasi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

c. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target akhir renstra, dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Akhir Renstra

Bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2016 dengan target akhir renstra, maka telah tercapai 100,00% dari target 100,00% atau mencapai 100,00%. Untuk itu sosialisasi dan pembinaan terkait peningkatan keterbukaan informasi publik kepada SKPD harus terus ditingkatkan agar informasi pembangunan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan informasi, khususnya informasi pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan.

*d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2016 telah mencapai target seperti yang diharapkan. Untuk itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi dengan baik.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kemampuan aparatur pada masing-masing SKPD dalam menyampaikan informasi dengan baik, sehingga masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang apa yang telah disosialisasikan/ disampaikan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam menyampaikan informasi dari masing-masing SKPD agar dapat tepat sasaran dan tepat materi.

*e. Efisiensi penggunaan sumber daya*

Realisasi kinerja pada Sasaran 3, dapat tercapai sebesar 100,00% dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97,92%. Hal ini menunjukkan efektifitas pemanfaatan anggaran yang ada untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditargetkan. Kurangnya realisasi keuangan dari 100% ini lebih dikarenakan efisiensi pada anggaran ATK, Perjalanan Dinas, Bahan Bakar Minyak (BBM), foto copy, dan beberapa belanja lainnya.

*f. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk dapat mencapai Sasaran 3 ini, maka terdapat 1 Program dan 6 Kegiatan yang mendukung. Program tersebut adalah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi
- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Komunikasi Sosial Masyarakat
- Penyebarluasan informasi dalam rangka tatap muka dan dialog interaktif

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari total keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng tahun 2016 sebesar Rp.3.750.640.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 3.701.958.591,00 (*tiga milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau mencapai 98,70% (*sembilan puluh delapan koma tujuh puluh persen*). Sedangkan anggaran pada program-program bidang komunikasi dan informatika (sesuai dengan Perjanjian Kinerja/ Tabel 2.2 di atas) sebesar Rp.2.420.790.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.399.778.383,00 atau mencapai 99,13%.

Pada sasaran ke-1, Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*electronic Government/ e-Gov*), dari anggaran Rp.1.494.880.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.491.240.800,00 atau tercapai 99,76%. Sedangkan pada sasaran ke-2, Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebesar Rp.106.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar 105.775.823,00 atau tercapai 99,79%.

Untuk sasaran ke-3, Meningkatkan penyebaran informasi daerah kepada masyarakat, dari anggaran Rp.682.605.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.668.407.738,00 atau tercapai 97,92%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (electronic Government/ e-Gov)	1. Persentase SKPD yang dapat mengakses jaringan e-gov	100,00%	100,00%	100,00	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.157.800.000	1.154.352.379	99,70
		2. Nilai rata-rata Penilaian PEGI Pemkab. Buleleng	2,5	3,58	143,20	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	337.080.000	336.888.421	99,94
						2. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	137.305.000	134.354.022	97,85
2.	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi	1. Persentase jumlah SDM Aparatur yang terlatih di bidang TIK	12,16%	11,55%	94,98	1. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	106.000.000	105.775.823	99,79
3.	Meningkatnya penyebaran informasi daerah kepada masyarakat	1. Persentase SKPD yang melaksanakan keterbukaan informasi publik	100,00%	100,00%	100,00	1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	682.605.000	668.407.738	97,92

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, laporan ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan ini akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, Laporan ini memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 tahun 2008 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 55 tahun 2008.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2016 rata-rata mencapai mencapai 109,55%. Hal ini disebabkan oleh satu indikator yang tercapai 143,20% dan satu indikator lagi tercapai 94,98%, sedangkan yang lain dapat tercapai 100%. Sedangkan pada bagian keuangan, realisasi mencapai 99,30%. Sisa anggaran lebih dikarenakan efisiensi anggaran yang ada, sehingga terjadi sisa pada anggaran, ATK, foto copy, BBM, perjalanan dinas, dan beberapa anggaran lainnya. Dari hasil analisis yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2016 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga jika dilihat dari trend perkembangannya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, apa yang telah ditargetkan di akhir tahun renstra optimis dapat tercapai.

Beberapa persoalan dan tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pada tahun mendatang antara lain:

1. Masih adanya SKPD yang memiliki sistem informasi/aplikasi namun belum terintegrasi atau diterapkan dalam jaringan online system, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan dibuatnya regulasi yang mengatur pengadaan dan penerapan sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Masih banyaknya aparatur pemerintah yang belum mampu memanfaatkan TIK dalam kegiatannya, sehingga pelatihan-pelatihan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas aparatur pemerintah.

3. Masih terbatasnya fasilitas pada lab pelatihan komputer yang dimiliki sehingga jumlah peserta yang mengikuti pelatihan masih sangat terbatas. Untuk itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.

Demikian laporan ini disusun, kiranya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

